



Continuity over Rupture: Elite Cartels and Democratic Recession in the Indonesian Transition

Kontinuitas di Balik Wacana Perpecahan: Kartel Elit dan Regresi Demokrasi Indonesia

Ryan Gunawan

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ryan Gunawan

✉ ryangunawan@gmail.com

History:

Submitted: 11-01-2026

Revised: 22-02-2026

Accepted: 28-02-2026

Keyword:

Political Transition, Political Cartel, Democratic Recession, Elite Continuity, Indonesian Politics.

Kata Kunci:

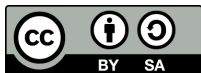
Transisi Politik, Kartel Politik, Regresi Demokrasi, Kontinuitas Elit, Politik Indonesia.

Abstract

This article analyzes the presidential power transition in Indonesia from Joko Widodo to Prabowo Subianto, juxtaposing the state's narrative of a smooth, mature democracy against the provocative hypothesis of an impending "radical break". It argues that the "radical break" discourse is not a literal prediction but a political instrument for managing power dynamics and public perception. Through a qualitative, descriptive-analytical method and employing the "political cartel" framework, this study deconstructs the transition's underlying logic. The analysis reveals that the transition represents not a rupture, but a continuity of pragmatic, elite-driven politics. President Prabowo inherits a political apparatus characterized by democratic recession, institutional weakness, and a super-majority coalition designed to neutralize opposition. Consequently, any cabinet reshuffle should be interpreted as a strategic recalibration of patronage networks to consolidate personal authority rather than a fundamental ideological shift, reinforcing the persistence of cartel politics over substantive democratic change.

Abstrak

Artikel ini menganalisis transisi kekuasaan presidensial di Indonesia dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, dengan mempertentangkan narasi negara tentang demokrasi yang matang dan mulus dengan hipotesis provokatif mengenai "perpecahan radikal" (radical break). Penelitian ini berargumen bahwa wacana radical break bukanlah prediksi literal, melainkan instrumen politik untuk mengelola dinamika kekuasaan dan persepsi publik. Melalui metode kualitatif deskriptif-analitis dan menggunakan kerangka "kartel politik", studi ini mendekonstruksi logika yang mendasari transisi tersebut. Analisis menunjukkan bahwa transisi ini merepresentasikan sebuah kontinuitas politik pragmatis yang digerakkan oleh elit, bukan sebuah perpecahan. Presiden Prabowo mewarisi aparatus politik yang ditandai oleh regresi demokrasi, pelemahan institusional, dan koalisi super mayoritas yang dirancang untuk menetralkan oposisi. Oleh karena itu, setiap perombakan kabinet harus diinterpretasikan sebagai kalibrasi ulang strategis jaringan patronase untuk mengkonsolidasikan otoritas personal, bukan sebagai pergeseran ideologis yang fundamental, yang justru memperkuat persistensi politik kartel di atas perubahan demokrasi yang substantif.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Transisi kekuasaan presidensial di Indonesia dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto menghadirkan sebuah teka-teki analitis yang sentral. Di satu sisi, proses ini dicitrakan oleh para aktor negara sebagai puncak kematangan demokrasi, sebuah transisi yang berjalan mulus, bahkan disebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Republik. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berada pada tingkat yang matang, sebuah demokrasi yang sejuk dan mempersatukan, bukan yang saling menjatuhkan. Narasi resmi ini menggarisbawahi stabilitas, persatuan, dan kesinambungan sebagai ciri utama dari pergantian kepemimpinan nasional [1].

Namun, di sisi lain, wacana publik diramaikan oleh sebuah hipotesis yang provokatif dan berlawanan, yang diartikulasikan secara tajam oleh komentator politik Rocky Gerung. Ia memprediksi akan terjadinya sebuah "*radical break*" atau perpecahan radikal setelah peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025. Konsep ini didefinisikan sebagai perombakan kabinet besar-besaran, reposisi elit, dan pemutusan pengaruh dari pemerintahan sebelumnya, yang secara efektif akan menghapuskan "kekuasaan lama" yang bersarang di pemerintahan [2]. Narasi ini menjanjikan sebuah ruptur, sebuah momen diskontinuitas di mana arah politik pemerintah akan diubah secara fundamental, menandakan sebuah guncangan signifikan terhadap peta politik nasional.

Artikel ini menggunakan ketegangan antara dua narasi yang saling bertentangan ini: kontinuitas yang harmonis versus perpecahan yang radikal sebagai titik masuk untuk sebuah investigasi yang lebih mendalam. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa gagasan "*radical break*" merupakan sebuah interpretasi permukaan yang mengaburkan kontinuitas yang lebih mendalam dalam *modus operandi* politik elit Indonesia. Transisi ini bukanlah pergeseran dari satu paradigma politik ke paradigma lain, melainkan serah terima sebuah aparatus politik yang telah dilemahkan dalam mekanisme pengawasan dan keseimbangan demokrasinya dari satu figur elit kepada penerus yang merupakan sekutu dekatnya. Dengan demikian, kepresidenan Prabowo bukanlah sebuah perpecahan dari warisan Jokowi, melainkan kelanjutan logisnya, mewarisi sebuah lanskap politik yang didefinisikan oleh regresi demokrasi dan didominasi oleh pakta-pakta elit yang pragmatis dan non-ideologis [3].

Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa narasi "*radical break*" itu sendiri berfungsi bukan sebagai prediksi literal, melainkan sebagai instrumen politik untuk mengelola ketegangan saat ini. Wacana ini memiliki beragam fungsi strategis. Bagi para kritikus seperti Gerung, ini adalah cara untuk menggalang oposisi dan pengawasan publik. Bagi faksi-faksi di dalam koalisi baru, ini berfungsi sebagai ancaman untuk menegaskan loyalitas. Dan bagi publik, ini menciptakan ilusi akuntabilitas dan perubahan, menutupi kontinuitas kepentingan elit yang mendasarinya. Kontradiksi antara narasi perpecahan dan narasi keharmonisan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah fitur dari momen politik ini. Wacana "perpecahan" memungkinkan Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan membuat elemen-elemen dari garda lama (loyalis Jokowi) merasa tidak aman dan khawatir akan tersingkir. Pada saat yang sama, wacana ini menenangkan publik yang mungkin waspada terhadap sifat dinasti dan etika yang dipertanyakan dari transisi ini dengan menjanjikan sebuah "bersih-bersih" di masa depan. Dengan demikian, wacana itu sendiri adalah sebuah bentuk tindakan politik yang membentuk dinamika kekuasaan yang coba digambarkannya [4].

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis terhadap dokumen yang diberikan, perumusan masalah untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah narasi "*radical break*" merupakan prediksi yang akurat mengenai perubahan fundamental dalam arah kebijakan dan ideologi, ataukah ia berfungsi sebagai instrumen politik untuk mengelola dinamika kekuasaan internal dan persepsi publik?
- b. Bagaimana struktur kekuasaan yang diwarisi Prabowo, yang ditandai oleh pelemahan institusi demokrasi dan pembentukan kartel politik pragmatis, membatasi kemungkinan terjadinya sebuah perpecahan radikal dan justru mendorong kontinuitas model politik era sebelumnya?
- c. Jika terjadi perombakan kabinet atau reposisi elit, apakah tindakan tersebut harus diinterpretasikan sebagai "perpecahan" ideologis, atau lebih tepat dipahami sebagai konsolidasi kekuasaan personal Presiden Prabowo untuk mengkalibrasi ulang jaringan patronase di dalam kerangka kartel politik yang ada?
- d. Dalam konteks konsolidasi kekuasaan elit dan pelemahan institusi demokrasi formal, bagaimana peran dan kapasitas masyarakat sipil serta metode

akuntabilitas baru seperti forensik elektoral dalam berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan yang efektif?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi literatur dan analisis wacana kritis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk literatur akademis mengenai politik Indonesia, rilis berita dari media massa, pernyataan resmi aktor negara, dan komentar politik yang beredar di ruang publik. Analisis dilakukan dengan membenturkan dua narasi yang kontradiktif yakni narasi "transisi mulus" dari negara dan hipotesis "*radical break*" dari para kritikus untuk mendekonstruksi logika dan struktur kekuasaan yang mendasarinya. Kerangka konseptual seperti "kartel politik" dan "regresi demokrasi" digunakan sebagai alat analisis utama untuk menginterpretasi berbagai peristiwa kunci, seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan manuver politik dalam Pilkada Jakarta 2024, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kontinuitas modus operandi elit politik di balik wacana perubahan yang radikal.

B. PEMBAHASAN

1. Lanskap yang Diwariskan: Regresi Demokrasi dan Politik Dinasti di Era Akhir Jokowi

Untuk memahami secara utuh arsitektur kekuasaan yang dioperasikan oleh Presiden Prabowo, analisis harus dimulai dari lanskap politik yang ia warisi. Bagian ini berargumen bahwa kondisi bagi demokrasi yang melemah telah dibangun secara sistematis selama masa jabatan kedua Presiden Jokowi. Proses kemunduran demokrasi ini, yang ditandai oleh instrumentalisasi institusi negara untuk keuntungan politik dan keluarga, secara fundamental telah mengubah aturan main bagi Pemilu 2024 dan seterusnya. Warisan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian tindakan strategis yang berpuncak pada pelemahan mekanisme akuntabilitas dan pembentukan dinasti politik di tingkat kepresidenan.

a. Pelemahan Institusional dan Erosi Akuntabilitas

Salah satu ciri paling menonjol dari era akhir Jokowi adalah erosi sistematis terhadap institusi-institusi yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga yang sangat populer dan pernah menjadi ujung tombak akuntabilitas, secara efektif

"ditumpulkan" melalui revisi undang-undang yang kontroversial [3]. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan hambatan bagi investasi dan sebagai alat untuk mendisiplinkan elit politik, namun dengan konsekuensi melemahnya perang melawan korupsi secara signifikan [5].

Secara paralel, terjadi konsolidasi kontrol atas aparatus keamanan. Penunjukan loyalis pada posisi-posisi kunci di bidang penegakan hukum mengubah aparatus keamanan menjadi alat untuk "meredam perbedaan pendapat" di masyarakat sipil, yang secara langsung melemahkan akuntabilitas vertikal. Di ranah legislatif, aliansi strategis dengan Prabowo, yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan, membawa Partai Gerindra ke dalam koalisi Jokowi. Langkah ini memberinya kontrol yang nyaris total atas parlemen, meniadakan oposisi yang berarti dan mengikis akuntabilitas horizontal. Dengan parlemen yang terkendali, pemerintah berhasil "meloloskan undang-undang yang berjangkauan luas" seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengurangi perlindungan tenaga kerja dan membongkar perlindungan lingkungan demi memfasilitasi investasi dan akuisisi lahan oleh pemerintah [4].

b. Manipulasi Yudisial dan Puncak Politik Dinasti

Puncak dari tren pelemahan institusional ini adalah apa yang digambarkan sebagai "penggunaan kekuasaan negara yang paling kurang ajar": manipulasi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melanggengkan kepentingan keluarga. Putusan MK yang menciptakan "celah hukum di menit-menit terakhir" untuk memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden meskipun secara hukum usianya belum mencukupi menjadi titik kulminasi dari proses ini. Putusan ini, yang diketuai oleh ipar Jokowi, dipandang bukan sekadar sebagai nepotisme, melainkan sebagai pelanggaran garis merah elektoral yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah demokrasi Indonesia dan merupakan penegasan berdirinya sebuah dinasti presidensial [4].

Tindakan ini menandakan bahwa politik telah secara eksplisit tunduk pada kepentingan keluarga, di mana hukum tidak lagi menjadi kompas negara, melainkan dirancang untuk membenarkan tindakan rezim yang berkuasa. Fenomena ini memperkuat asumsi bahwa hukum telah kalah di hadapan politisi pragmatis, sebuah kondisi yang digambarkan dengan adagium yang terbalik: bukan *Politiae legibus non leges politii adoptandae* (politik harus tunduk pada hukum), melainkan

sebaliknya [6].

c. Intervensi Elektoral dan Warisan Regresi

Pembentukan dinasti ini tidak berhenti pada putusan MK. Selama masa kampanye, Jokowi dituduh "mengerahkan semua sumber daya negara" untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran dalam satu putaran. Ini termasuk penyaluran dana bantuan sosial secara masif ke daerah-daerah padat pemilih dan penggunaan institusi koersif seperti kepolisian untuk "mengintimidasi pejabat daerah" demi mengamankan kemenangan telak. Intervensi ini mengaburkan batas antara pemilu yang demokratis dan pemilu yang diatur, meninggalkan warisan demokrasi yang cacat secara prosedural maupun substansial [7].

Dengan demikian, warisan yang ditinggalkan Jokowi untuk penggantinya adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia meninggalkan lingkungan politik yang lebih permisif bagi Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Di sisi lain, ia meninggalkan kerangka demokrasi yang rusak parah, sebuah warisan "kebangkitan otoritarianisme" dan "pembongkaran demokrasi". Rangkaian tindakan ini jika dilihat secara kronologis menunjukkan sebuah pola yang koheren: pelemahan KPK, pengendalian parlemen, dan kooptasi oposisi bukanlah tindakan yang terpisah, melainkan prasyarat yang diperlukan untuk tujuan akhir mengamankan suksesi keluarga. Regresi demokrasi bukanlah efek samping yang tidak diinginkan dari agenda pembangunan, melainkan komponen integral dan strategis dari rencana suksesi politiknya. Hal ini membingkai ulang warisannya dari seorang pembangunis populis yang tersandung pada demokrasi, menjadi seorang aktor politik strategis yang secara sengaja mengikisnya demi tujuan pribadi dan dinasti.

Tabel 1. Narasi Ganda dalam Transisi Jokowi-Prabowo

Peristiwa/Proses Kunci	Narasi Resmi Negara (Pandangan "Transisi Mulus")	Narasi Akademis/Masyarakat Kritis (Pandangan "Regresi Demokrasi")
Putusan MK tentang Batas Usia Capres/Cawapres	Menegakkan hukum dan memberikan kesempatan bagi potensi kaum muda untuk memimpin.	Instrumentalisasi yudikatif untuk kepentingan dinasti; manipulasi hukum yang merusak integritas konstitusi.
Peran Bantuan Sosial (Bansos)	Bantuan pemerintah yang sah untuk rakyat	Politisasi sumber daya negara untuk keuntungan elektoral;

dalam Kampanye	yang membutuhkan, terlepas dari momentum politik.	penggunaan bansos sebagai alat untuk membeli suara secara terselubung.
Pembentukan Koalisi Pasca-Pemilu	Membangun persatuan dan stabilitas nasional untuk keberlanjutan pembangunan.	Kartelisasi politik yang menetralkan oposisi; pembentukan koalisi gemuk untuk membagi "kue kekuasaan" tanpa landasan ideologis.
Status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Melakukan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum bagi investasi.	Pelemahan sistematis terhadap garda terdepan pemberantasan korupsi; menghilangkan mekanisme pengawasan yang krusial.

2. **Arsitektur Kekuasaan: Kartel Politik dan Koalisi Super Pragmatis**

Struktur kekuasaan yang menopang pemerintahan Prabowo Subianto tidak dapat dipahami melalui lensa koalisi ideologis tradisional. Sebaliknya, ia paling baik dianalisis melalui kerangka "kartel politik". Bagian ini berargumen bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bukanlah sebuah aliansi yang didasarkan pada platform kebijakan atau kesamaan ideologi, melainkan sebuah kartel pragmatis yang dirancang untuk memonopoli kekuasaan, mengendalikan distribusi sumber daya, dan menetralkan kompetisi politik yang bermakna. Struktur inilah yang menjadi alasan utama mengapa sebuah "*radical break*" secara struktural tidak mungkin terjadi.

a. **Pragmatisme dan Kartel Politik**

Literatur akademis mengenai politik Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa partai-partai politik beroperasi berdasarkan prinsip pragmatisme, transaksionalisme, dan pengejaran patronase, dengan ideologi hanya memainkan peran minimal. Koalisi politik dibangun bukan untuk memperjuangkan agenda kebijakan bersama, melainkan untuk mendapatkan bagian dari "kue kekuasaan".¹⁸ Sifat koalisi yang sangat cair dan acak, di mana partai-partai berbasis agama dapat bergabung dengan partai sekuler-nasionalis tanpa kesulitan, adalah bukti nyata dari mudahnya peran ideologi. Bahkan partai-partai dengan ideologi yang berseberangan dapat tiba-tiba bergabung dalam koalisi yang sama demi kemenangan [8].

Fenomena ini telah berkembang menjadi apa yang oleh para sarjana seperti Richard S. Katz, Peter Mair, dan Vedi R. Hadiz disebut sebagai "politik kartel". Dalam model ini, partai-partai politik berkolusi untuk menghindari persaingan terbuka, yang pada akhirnya melemahkan dinamika demokrasi. Tujuannya bukan hanya untuk memenangkan pemilu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kekuasaan yang telah mereka bangun bersama dan mengendalikan distribusi sumber daya politik dan ekonomi [9]. Di Indonesia, partai-partai papan atas dan menengah seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM), sebuah aliansi yang dirancang untuk mendominasi panggung politik nasional. Koalisi ini kemudian diperkuat dengan melibatkan Nasdem, PKS, dan PKB, membentuk "KIM Plus" untuk menciptakan satu kekuatan politik yang hampir tak terkalahkan.

b. Studi Kasus: Operasi Politik dalam Pilkada Jakarta 2024

Logika operasional kartel ini diilustrasikan secara sempurna dalam manuver politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Anies Baswedan, seorang tokoh politik dengan elektabilitas konsisten tertinggi dalam berbagai survei, secara efektif dihalangi untuk maju. Meskipun populer di kalangan publik, Anies tidak memiliki tempat dalam struktur kartel yang dominan.

KIM Plus melakukan "operasi politik yang cerdik dan licik" untuk memastikan Anies tidak mendapatkan dukungan partai politik yang cukup. Partai-partai yang sebelumnya dianggap sebagai pendukung potensial Anies, seperti Nasdem, PKS, dan PKB, berhasil dikooptasi. Melalui kombinasi "tekanan politik yang intimidatif, tawaran politik yang menggiurkan, dan janji posisi strategis di pemerintahan," kartel ini berhasil menarik partai-partai tersebut ke dalam orbitnya. Hasilnya, sebuah koalisi raksasa yang terdiri dari 12 partai politik akhirnya mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono, meninggalkan Anies tanpa kendaraan politik [10]. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam politik kartel, preferensi elektoral publik dapat dikesampingkan demi menjaga kepentingan dan stabilitas elit yang berkuasa. Logikanya sederhana: serap atau netralkan semua ancaman yang layak.

c. Koalisi Gemuk: Stabilitas Semu yang Rapuh

Pembentukan koalisi super mayoritas di bawah Prabowo, yang menguasai sebagian besar kursi di parlemen, adalah manifestasi institusional dari kartel ini. Struktur "gemuk" ini secara inheren membatasi ruang bagi oposisi dan membuat

cabang eksekutif sebagian besar kebal terhadap pengawasan dan keseimbangan legislatif. Di permukaan, ini menciptakan citra stabilitas politik dan persatuan nasional yang sering dipuji oleh pemerintah [11].

Namun, stabilitas ini bersifat semu dan rapuh. Sistem politik ini menjadi stabil karena berhasil menghilangkan konflik ideologis dan oposisi sehari-hari, memungkinkan eksekutif untuk memerintah dengan gesekan minimal. Namun, ia menjadi rapuh karena stabilitas ini dicapai dengan menekan perpecahan dan keluhan masyarakat yang sebenarnya, bukan dengan memediasinya. Sistem ini kekurangan mekanisme untuk memproses perbedaan pendapat. Ketika frustrasi publik yang tak terhindarkan baik karena isu lingkungan seperti dampak IKN, kekhawatiran atas hak-hak minoritas, atau kemarahan atas korupsi akhirnya meluap, ia dapat bermanifestasi di luar saluran politik formal dengan cara yang lebih disruptif. Demokrasi yang sehat dirancang untuk menjadi tangguh dengan menyalurkan konflik melalui partai dan pemilu. Dengan menghilangkan fungsi ini, kartel membuat sistem menjadi rapuh. Krisis ekonomi atau skandal politik besar di masa depan dapat memicu reaksi publik yang tidak memiliki kapasitas institusional untuk ditangani oleh sistem, yang berpotensi menyebabkan krisis yang lebih parah dan tidak terduga daripada yang akan terjadi dalam sistem demokrasi yang lebih kompetitif.

3. Perpecahan Semu? Mengevaluasi Ulang Kekuasaan Presidensial dan Reposisi Elit

Bagian inti ini secara langsung mengkonfrontasi tesis "*radical break*". Argumen yang diajukan adalah bahwa setiap perombakan kabinet atau perubahan personel di bawah Presiden Prabowo tidak boleh ditafsirkan sebagai sebuah ruptur ideologis atau perpecahan dengan "kekuasaan lama". Sebaliknya, langkah-langkah tersebut harus dipahami sebagai kalibrasi ulang strategis jaringan patronase dan konsolidasi otoritas pribadinya di dalam kerangka kartel yang sudah ada. Logika pragmatisme yang mendominasi politik Indonesia mendikte bahwa loyalitas dan utilitas, bukan kebijakan atau ideologi, yang akan menentukan komposisi kekuasaan.

a. Mendekonstruksi Narasi "Perpecahan"

Prediksi Rocky Gerung tentang perombakan besar-besaran pasca-17 Agustus 2025, yang digambarkan sebagai momen pemutusan hubungan dengan pemerintahan sebelumnya, perlu dianalisis melalui lensa pragmatis. Motivasi di

balik perombakan semacam itu bukanlah untuk mengubah arah politik secara fundamental. Hal ini terbukti dari adanya kesinambungan kebijakan-kebijakan utama era Jokowi, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program hilirisasi sumber daya alam, yang secara eksplisit dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Karena agenda Prabowo sebagian besar merupakan perpanjangan dari agenda Jokowi, sebuah perpecahan kebijakan yang substantif menjadi sangat tidak mungkin.

Sebaliknya, tujuan utama dari perombakan adalah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ini berarti mengganti loyalis Jokowi dengan loyalis Prabowo untuk memastikan bahwa presiden baru memiliki kendali penuh atas aparatus negara dan sumber dayanya. Analisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti bahwa meskipun ada keberlanjutan kebijakan, sebagian besar pengambil kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan akan berubah, dengan peran presiden yang diperkirakan akan lebih dominan [12]. Latar belakang Prabowo dan gaya kepemimpinannya yang diperkirakan akan sangat terpusat, terutama di sektor pertahanan dan keamanan, menuntut penghapusan figur-figur yang loyalitas utamanya berada di tempat lain.

Logika ini diperkuat oleh temuan akademis bahwa koalisi partai dibangun di atas kesepakatan transaksional untuk memperebutkan "kue kekuasaan", bukan prinsip-prinsip bersama. Dalam konteks ini, "perpecahan" hanyalah sebuah renegosiasi tentang bagaimana kue ini dibagi, bukan keputusan untuk membuat kue yang berbeda [6].

b. Konsolidasi Kekuasaan dan Pergeseran Keseimbangan Internal

Jika Prabowo berhasil melaksanakan "perpecahan" ini yaitu, secara efektif menyingkirkan pengaruh faksi Jokowi dan menempatkan orang-orangnya sendiri di posisi-posisi strategis hal ini akan menandakan sebuah pergeseran penting dalam keseimbangan kekuasaan internal kartel. Tindakan semacam itu membutuhkan modal politik pribadi yang sangat besar. Keberhasilannya akan menunjukkan bahwa otoritas pribadi Prabowo dan kendalinya atas aparatus negara (terutama sektor keamanan) lebih besar daripada kekuatan kolektif faksi-faksi di dalam kartel.

Ini dapat mengubah dinamika internal secara fundamental. Para pemimpin partai yang bergabung dengan koalisi demi keuntungan pragmatis akan menyadari bahwa posisi mereka bergantung pada kemurahan hati presiden, bukan pada

kekuatan independen partai mereka. Hal ini dapat memicu pergeseran dari oligarki multi-kutub (sebuah kartel yang terdiri dari mitra-mitra setara) ke sistem uni-kutub yang berpusat pada presiden. Dalam skenario ini, "*radical break*" yang sesungguhnya bukanlah antara Prabowo dan warisan Jokowi, melainkan antara kantor kepresidenan/wakil kepresidenan yang bersatu dan partai-partai politik (termasuk Gerindra, partai Prabowo sendiri) yang membentuk kartel. Konsolidasi kekuasaan yang berhasil oleh Prabowo dapat membuatnya mampu menundukkan para ketua partai, mengubah kartel dari dewan oligarki menjadi struktur yang lebih tunduk pada satu eksekutif yang dominan, sebuah model yang mengingatkan pada tahun-tahun terakhir era Orde Baru. Dengan demikian, "*radical break*" yang diwacanakan oleh para pengamat justru bisa menjadi awal dari sentralisasi kekuasaan yang lebih mendalam yang pada akhirnya melemahkan bahkan mitra koalisinya sendiri.

4. Penjaga Demokrasi: Masyarakat Sipil, Forensik Elektoral, dan Potensi Resiliensi

Meskipun bagian-bagian sebelumnya melukiskan gambaran suram tentang pembusukan demokrasi, bagian ini mengeksplorasi sumber-sumber potensial resiliensi dan akuntabilitas. Bagian ini akan menilai kapasitas masyarakat sipil Indonesia untuk bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan negara, menggunakan kerangka Tocquevillian sebagai lensa analisis. Lebih jauh lagi, bagian ini akan memperkenalkan metode modern yang digerakkan oleh data, yaitu "forensik pemilu", sebagai sebuah garda depan baru untuk menuntut pertanggungjawaban proses elektoral, serta membedakan pendekatan ilmiah ini dari klaim-klaim kecurangan yang dipolitisasi dan tidak berdasar.

a. Masyarakat Sipil dan "*Habits of the Heart*"

Alexis de Tocqueville, dalam analisisnya tentang demokrasi Amerika, menekankan pentingnya "*habits of the heart*" norma-norma kerja sama, kepercayaan, dan keterlibatan sipil yang dipupuk oleh kehidupan asosiasional yang dinamis sebagai fondasi demokrasi [13]. Demokrasi yang tumbuh dalam toleransi akan menetap dalam kebudayaan dan menjadi etika politik yang otentik. Dalam konteks Indonesia, organisasi masyarakat sipil (OMS) telah lama memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak asasi manusia, memantau pemerintahan, dan membela kebebasan beragama. Mereka adalah perwujudan dari "masyarakat sipil" yang, menurut argumen klasik, berfungsi sebagai penyeimbang penting bagi

kekuasaan negara [14].

Namun, ada paradoks dan batasan yang melekat pada masyarakat sipil. Ada risiko kooptasi oleh negara, munculnya kelompok masyarakat sipil yang justru anti-demokrasi, dan tantangan beroperasi dalam iklim politik yang semakin represif. Pertanyaannya adalah: apakah masyarakat sipil Indonesia saat ini cukup kuat untuk menumbuhkan "*habits of the heart*" yang diperlukan untuk melawan pembusukan institusi demokrasi formal dari atas ke bawah? Dengan semakin terkonsentrasinya kekuasaan di tangan eksekutif dan melemahnya partai politik sebagai saluran aspirasi, peran OMS sebagai pengawas menjadi semakin krusial, sekaligus semakin sulit.

b. Garda Depan Baru: Forensik Elektoral dan Akuntabilitas Berbasis Data

Di tengah tantangan ini, muncul sebuah bentuk akuntabilitas baru yang lebih teknis: forensik elektoral. Penelitian akademis yang muncul menunjukkan penggunaan model statistik dan pembelajaran mesin (*machine learning*), seperti *Local Outlier Factor* (LOF), untuk mendeteksi anomali dalam data pemilih dan hasil pemilu. LOF adalah metode pembelajaran tanpa pengawasan yang mengidentifikasi anomali dengan mengukur kepadatan lokal setiap titik data dan membandingkannya dengan kepadatan titik data di sekitarnya. Titik data dengan nilai LOF yang jauh lebih tinggi dari tetangganya kemungkinan besar dianggap anomali, yang bisa menandakan adanya kesalahan entri data, penipuan, atau kesalahan sistem [15].

Pendekatan ilmiah ini sangat kontras dengan tuduhan kecurangan yang seringkali bersifat politis dan tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Dengan menggunakan konsep statistik seperti *p-value* dalam pengujian hipotesis, para analis dapat menilai secara statistik apakah suatu hasil pemilu yang diamati masuk akal atau kemungkinan besar merupakan hasil dari suatu anomali.

P-value mengukur probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrem dari yang diamati, dengan asumsi hipotesis nol (misalnya, tidak ada kecurangan) benar. *P-value* yang sangat kecil (biasanya di bawah 0.05) menunjukkan bahwa hasil yang diamati sangat tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memberikan bukti statistik untuk menolak hipotesis nol.³³ Pemanfaatan teknologi seperti *e-voting* dan analisis media sosial juga menjadi bagian dari lanskap politik elektoral yang terus berkembang, yang menuntut

metode pengawasan yang lebih canggih [16].

Namun, ada sebuah keterputusan yang berbahaya dan semakin besar antara dua "penjaga" demokrasi ini. Masyarakat sipil, yang berakar pada argumen normatif dan berbasis hak (seperti "*habits of the heart*" Tocqueville), semakin berbicara dalam bahasa yang berbeda dari dunia forensik pemilu yang teknokratis dan digerakkan oleh data. Agar resiliensi demokrasi menjadi efektif, kedua ranah ini harus diintegrasikan. OMS perlu mengembangkan literasi data untuk membuat klaim mereka lebih kuat dan berbasis bukti. Di sisi lain, para ilmuwan data perlu terlibat dengan OMS untuk memastikan temuan mereka relevan secara politis dan dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Saat ini, kedua bentuk pertahanan demokrasi ini beroperasi secara paralel, tetapi tidak bersinergi. Keterpisahan ini adalah sebuah kerentanan strategis. Klaim yang kuat tentang ketidakadilan elektoral akan membutuhkan ketajaman statistik dari deteksi anomali ("apa yang terjadi") dan kekuatan normatif dari advokasi masyarakat sipil ("mengapa ini penting"). Tanpa perpaduan ini, negara dapat dengan mudah memecah belah dan menaklukkan: menolak para aktivis sebagai tidak ilmiah dan para ilmuwan sebagai naif secara politik. Masa depan pengawasan demokrasi yang efektif di Indonesia mungkin bergantung pada penjembitan kesenjangan ini, menciptakan sebuah bentuk baru "aktivisme berbasis data".

C. KESIMPULAN

Artikel ini telah melakukan dekonstruksi terhadap narasi "*radical break*" dalam transisi kekuasaan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Analisis menunjukkan bahwa wacana perpecahan ini berfungsi sebagai fiksi politik yang menutupi kontinuitas mendasar dari politik pragmatis yang digerakkan oleh elit. Alih-alih sebuah ruptur, transisi ini lebih tepat dipahami sebagai konsolidasi kekuasaan di dalam kerangka kartel politik yang telah mapan, di mana loyalitas dikalibrasi ulang, namun struktur dan logika kekuasaan tetap tidak berubah.

Presiden Prabowo Subianto mewarisi sebuah lanskap politik yang telah secara sistematis diubah selama dekade terakhir. Ia mengambil alih sebuah "demokrasi yang telah dilubangi" (*hollowed democracy*), di mana institusi-institusi pengawasan telah dilemahkan, supremasi hukum telah dikompromikan untuk kepentingan dinasti, dan proses elektoral telah dicerai oleh intervensi negara yang belum pernah terjadi

sebelumnya. Situasi ini membawa Indonesia, seperti yang digambarkan oleh beberapa analisis, berada di ambang "otoritarianisme kompetitif" sebuah sistem di mana institusi demokrasi tetap ada, namun rentan terhadap penyalahgunaan oleh petahana untuk melanggengkan kekuasaan.

Transisi ini juga menegaskan persistensi struktur dan mentalitas elit era Orde Baru dalam politik demokrasi Indonesia. Baik Jokowi, yang berasal dari luar elit lama tetapi dengan cepat mengadopsi aturannya, maupun Prabowo, yang merupakan produk dari elit tersebut, pada akhirnya beroperasi dalam kerangka yang sama. Dengan demikian, transisi ini bukanlah kemenangan kekuatan politik baru, melainkan adaptasi yang berhasil dari garda lama terhadap mekanisme demokrasi elektoral. Sejarah suksesi presidensial yang sulit dan seringkali didasarkan pada keputusan politik daripada alasan hukum di Indonesia menjadi catatan peringatan tambahan akan kerapuhan proses ini.

Kesimpulannya, "*radical break*" adalah sebuah ilusi. Perpecahan yang sesungguhnya bukanlah antara pemerintahan Prabowo dan pemerintahan Jokowi, melainkan antara negara yang semakin terkonsolidasi dan masyarakat yang aspirasi demokrasinya semakin terpinggirkan. Artikel ini tidak ditutup dengan sebuah prediksi definitif, melainkan dengan ringkasan analitis tentang kekuatan-kekuatan yang sedang bertarung: di satu sisi, sebuah eksekutif yang kuat dan terpusat yang beroperasi di dalam kartel politik pragmatis; di sisi lain, masyarakat sipil yang terfragmentasi dan potensi pengawasan teknis yang baru lahir. Tanpa adanya pergeseran yang signifikan dan tak terduga, lintasan yang paling mungkin adalah erosi demokrasi yang terus berlanjut. Indonesia, di bawah kepemimpinan baru, tampaknya mewarisi sebuah demokrasi di senja kala.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Berita Satu, "Transisi dari Jokowi Berjalan Mulus, Prabowo: Demokrasi Kita Matang," 2025. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=gRhflUzHUZI>
- [2] Tribun Jogja Official, "Rocky Gerung Prediksi Akan Ada Perombakan Besar-Besaran Di Kabinet Prabowo Setelah HUT RI," 2025. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=zqC4uWCfUeg>
- [3] N. Sambhi, "Indonesia's eras: Reflections on Jokowi's legacy and Prabowo's presidency," The Brookings Institution. [Online]. Available: <https://www.brookings.edu/articles/indonesias-eras-reflections-on-jokowis-legacy-and-prabowos-presidency/>
- [4] S. Jaffrey and E. Warburton, "Prabowo's Indonesia: Inheriting Democracy at Dusk," Carnegie Endowment for International Peace. [Online]. Available:

- <https://carnegieendowment.org/research/2024/10/prabowos-indonesia-inheriting-democracy-at-dusk?lang=en>
- [5] A. F. dan T. Dianti, "Akui bagian dari tim Jokowi, Prabowo yakini transisi pemerintahan berjalan mulus," *Benar News*. [Online]. Available: <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/prabowo-yakin-transisi-mulus-03052024081657.html>
 - [6] M. R. Saputra and W. Setiadi, "Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections," *Int. J. Law Soc.*, vol. 1, no. 3, pp. 94–112, May 2024, doi: 10.62951/ijls.v1i3.65.
 - [7] A. S. Asfar, M. Asfar, D. L. Firdauz, I. G. W. Wicaksana, R. Ida, and Aribowo, "Understanding the Jokowi effect during Indonesia's 2024 presidential election: an integrative model of incumbency advantage," *Cogent Soc. Sci.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–18, Dec. 2025, doi: 10.1080/23311886.2025.2484470.
 - [8] R. Rosanti, "Political Pragmatics in Indonesia: Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections," *J. Bina Praja*, vol. 12, no. 2, pp. 153–165, Dec. 2020, doi: 10.21787/jbp.12.2020.153-165.
 - [9] R. S. Katz and P. Mair, "Changing Models of Party Organization and Party Democracy," *Party Polit.*, vol. 1, no. 1, pp. 5–28, Jan. 1995, doi: 10.1177/1354068895001001001.
 - [10] S. Jaffrey and E. Warburton, "Indonesia On The Edge of Competitive Authoritarianism," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 60, no. 3, pp. 283–304, Sep. 2024, doi: 10.1080/00074918.2024.2426571.
 - [11] M. Susanto, S. D. Harijanti, F. Manan, W. Dramanda, and M. Y. A. Hernawan, "Fat Coalition and Crown-Presidentialism: A Critical Review of Indonesia's Concurrent Elections," *PETITA J. Kaji. Ilmu Huk. dan Syariah*, vol. 10, no. 1, pp. 35–54, Feb. 2025, doi: 10.22373/petita.v10i1.757.
 - [12] Humas BRIN, "BRIN Kupas Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo," *Badan Riset Nasional*. [Online]. Available: <https://www.brin.go.id/news/121950/brin-kupas-transisi-kepemimpinan-jokowi-ke-prabowo>
 - [13] E. D. Baltzell and H. G. Schneiderman, Eds., "Habits of the Heart," in *Judgment and Sensibility*, Routledge, 2018, pp. 161–164. doi: 10.4324/9781351294683-26.
 - [14] S. Akboga and C. J. Einolf, "Against de Tocqueville: How membership in civil society organizations predicts understandings of democracy," *J. Civ. Soc.*, pp. 1–20, Apr. 2025, doi: 10.1080/17448689.2025.2489971.
 - [15] N. Nugraha, G. P. Insany, and R. K. Wardana, "Implementation Of The Local Outlier Factor Model For Anomaly Detection In Kpu Sukabumi Regency Voter Data," *JUPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.)*, vol. 10, no. 1, pp. 295–303, Jan. 2025, doi: 10.29100/jupi.v10i1.5795.
 - [16] S. Sakir, M. Sukarno, and T. Sulaksono, "Mapping Publication of E-Voting, Bibliometric Analysis, and How About Opportunities Indonesia for That?," in *Proceedings of the 9th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries (ICISPE 2024)*, 2025, pp. 262–274. doi: 10.2991/978-2-38476-436-5_23.